WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0047 TAHUN 2024

TENTANG

PENANGGUNG JAWAB INDIKATOR RENCANA KINERJA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINSITRASI JAKARTA UTARA,

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 121 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

b. bahwa dalam rangka efektifitas pencapaian target perlu disusun rencana kegiatan strategis daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Penanggung Jawab Indikator Rencana Kinerja Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2024 dengan Keputusan Walikota.

Mengingat : 1. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 71023);

2. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 19 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 72006) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 69 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 51027);

3. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 121 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 72033;

4. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 37 Tahun 2022 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 31016);

5. Peraturan...

5. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 71023).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENANGGUNG JAWAB INDIKATOR RENCANA KINERJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA TAHUN 2024.

KESATU : Indikator Rencana Kinerja Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2024 terdiri dari Rencana Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara dan Indikator Wajib Kinerja Pegawai Kota Administrasi Jakarta Utara, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Para Asisten Agar Memonitor, Mengevaluasi serta Melaporkan Hasil Kegiatan Indikator Rencana Kinerja Kota Administrasi Jakarta Utara yang menjadi Tanggung Jawab sesuai Bidangnya Kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara.

KETIGA : Para Camat Kota Administrasi Jakarta Utara, Para Kepala Bagian Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara dan Para Lurah Kota Administrasi Jakarta Utara Bertanggungjawab untuk Melaksanakan serta Melaporkan Hasil Pelaksanaan Rencana Aksi Indikator Rencana Kinerja Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2024 yang Menjadi Tanggung Jawabnya sesuai Lampiran Surat Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara melalui Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan, dan Pelayanan Publik Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara.

KEEMPAT : Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara dan Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara untuk Memonitor, Mengevaluasi Pelaksanaan Input Realisasi Pencapaian Indikator Rencana Kinerja Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2024.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Mei 2024

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA,

ALI MAULANA HAKIM
NIP. 197004261991011001

Tembusan :
1. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara
3. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara
4. Para Asisten Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara
5. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Utara
6. Para Kepala Bagian Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara
7. Para Lurah Kota Administrasi Jakarta Utara

LAMPIRAN I
SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

NOMOR e-0047 TAHUN 2024

TENTANG
PENANGGUNG JAWAB INDIKATOR KINERJA PERJANJIAN KINERJA WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
TAHUN 2024

RENCANA KINERJA WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA TAHUN 2024

No	Sasaran	No	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan	Penanggung Jawab
						I	II	III	IV			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Sasaran Strategis												
1	Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai Kota Pesisir yang memberikan Perbaikan Layanan Publik serta Pemerataan Hasil	1	Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi	e-MONEV	**Dasar Hukum :** Peraturan Menteri PAN&RB No. 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik **Definisi Operasional :** Indeks kepuasan layanan kota administrasi merupakan hasil rata-rata pengukuran dari survey kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan	N/A	93.785	N/A	93.785	93.785	Nilai	**Eselon III:** 1. Asisten Pemerintahan 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan 3. Asisten Administrasi dan Kesra 4. Para Camat 5. Kabag. KKPP

No...

No	Sasaran	No	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan	Penanggung Jawab
						I	II	III	IV			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Pembangunan Optimal				kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan dan hasil indeks kepuasan koordinasi kota/kabupaten administrasi. **Metode Pengukuran :** Formulasi Pengukuran: Hasil diperoleh dengan cara rata-rata dari hasil indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan, dan hasil indeks kepuasan koordinasi kota/kabupaten Administrasi dalam rangka mendukung bidang unsur Kecamatan Administrasi **Sumber Data :** Hasil Perhitungan Mandiri (rata-rata) Atas Hasil Survey Kepuasan Masyarakat dan Efektifitas Koordinasi yang dilakukan melalui Jaksurvei							6. Kabag. Pemerintahan 7. Kabag. Pembangunan dan Lingkungan Hidup 8. Kabag. Kesra **<u>Eselon IV:</u>** **1. Ketua Sub.Kelompok Pelayanan Publik** **2.** Para Lurah

No...

No	Sasaran	No	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan	Penanggung Jawab
						I	II	III	IV			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2	Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi	e-MONEV	**Dasar Hukum :** Peraturan Menteri PAN&RB No. 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik **Definisi Operasional :** Indeks kepuasan layanan kota administrasi merupakan hasil rata-rata pengukuran dari survey kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan) dan hasil indeks kepuasan koordinasi kota/kabupaten administrasi. **Metode Pengukuran :** Formulasi Pengukuran: Hasil diperoleh dengan cara rata-rata dari hasil indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan, dan hasil indeks kepuasan koordinasi kota/kabupaten administrasi. **Sumber Data :**	N/A	93.785	N/A	93.785	93.785	Nilai	**Eselon III:** 1. Asisten Pemerintahan 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan 3. Asisten Administrasi dan Kesra 4. Para Camat 5. Kabag. KKPP 6. Kabag. Pemerintahan 7. Kabag. Pembangunan dan Lingkungan Hidup 8. Kabag. Kesra **Eselon IV:** **1. Ketua Sub.Kelompok Pelayanan Publik** **2.** Para Lurah

No...

No	Sasaran	No	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan	Penanggung Jawab
						I	II	III	IV			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Hasil Perhitungan Mandiri (rata-rata) Atas Hasil Survey Kepuasan Masyarakat dan Efektifitas Koordinasi yang dilakukan melalui Jaksurvei							
2	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara yang Optimal	1	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan	e-MONEV	**Dasar Hukum :** Peraturan Menteri PAN&RB No. 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik **Definisi Operasional :** Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan (termasuk di kecamatan dan kelurahan) merupakan hasil survei kepuasan kepada masyarakat yang dilakukan untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Adapun unsur layanan yang di survey diantaranya Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat	N/A	95.275	N/A	95.275	95.275	Nilai	**Eselon III:** 1. Asisten Pemerintahan 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan 3. Asisten Administrasi dan Kesra 4. Para Camat 5. Kabag. KKPP 6. Kabag. Pemerintahan 7. Kabag. Pembangunan dan Lingkungan Hidup 8. Kabag. Kesra **Eselon IV:**

No...

No	Sasaran	No	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan	Penanggung Jawab
						I	II	III	IV			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Melalui Gerakan PKK, Penyelenggaraan Kegiatan Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Chikungunya Melalui Pengerahan Juru Pemantau Jentik (Jumantik), Pelaksanaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), PPSU, RPTRA, dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum, serta kepuasan terhadap pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM). **Metode Pengukuran :** Metode pengukuran mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017, dimana masyarakat melakukan penilaian kepuasan terhadap layanan dalam rentang angka skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat), dengan rentang penilaian persepsi sebagai berikut: a. Nilai Persepsi 1, dengan nilai interval IKM sebesar 1,00 – 2,59, atau nilai interval konversi 25.00 – 64,99; b. Nilai Persepsi 2, dengan nilai							**1. Ketua Sub.Kelompok Pelayanan Publik** **2.** Para Lurah **3.** Para Kasi Kecamatan **4.** Para Kasi Kelurahan

No...

No	Sasaran	No	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan	Penanggung Jawab
						I	II	III	IV			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					interval IKM sebesar 2,60 – 3,06, atau nilai interval konversi 65.00 – 76,60; c. Nilai Persepsi 3, dengan nilai interval IKM sebesar 3,07 – 3,53, atau nilai interval konversi 76,61 – 88,30; d. Nilai Persepsi 4, dengan nilai interval IKM sebesar 3,54 – 4,00, atau nilai interval konversi 88,31 – 100,00. Nilai interval IKM diperoleh dari hasil survei yang kemudian diubah menjadi nilai interval konversi (25 x Nilai Interval IKM). Hasil diperoleh dengan cara survei indeks kepuasan masyarakat di tingkat Kelurahan. Kemudian hasil capaian seluruh Kelurahan menjadi rata-rata capaian Kecamatan dan kemudian rata-rata kecamatan menjadi capaian Walikota, dengan responden survei adalah masyarakat dan kader minimal 100 orang per pelayanan.							

No...

No	Sasaran	No	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan	Penanggung Jawab
						I	II	III	IV			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Sumber Data : Hasil Survey Kepuasan Masyarakat melalui Jaksurvei							
		2	Indeks Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi	e-MONEV	**Dasar Hukum :** Peraturan Menteri PAN&RB No. 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik **Definisi Operasional :** Hasil pengukuran terhadap efektifitas pelaksanaan koordinasi yang dilakukan oleh Kota/Kabupaten Administrasi terhadap UKPD di wilayahnya, yang mencakup koordinasi pada bidang pemerintahan, perekonomian dan pembangunan, serta administrasi dan kesejahteraan rakyat. **Metode Pengukuran :** Hasil pengukuran terhadap efektifitas pelaksanaan koordinasi Kota/Kabupaten	N/A	92.3	N/A	92.3	92.3	Nilai	**Eselon III:** 1. Asisten Pemerintahan 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan 3. Asisten Administrasi dan Kesra 4. Kabag. Pemerintahan 5. Kabag. Hukum 6. Kabag. Perekonomian 7. Kabag. Pembangunan dan LH 8. Kabag. Kesra **Eselon IV:** **1.Ketua Sub.Kelompok Tata Praja**

No...

No	Sasaran	No	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan	Penanggung Jawab
						I	II	III	IV			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Administrasi didapatkan melalui rata-rata hasil pelaksanaan survei kepuasan terhadap pelaksanaan koordinasi UKPD pada rumpun pemerintahan, perekonomian dan pembangunan, serta administrasi dan kesejahteraan rakyat, dengan responden Kepala UKPD di masing-masing Kota/Kabupaten Administrasi. **Sumber Data :** Hasil Perhitungan Mandiri (rata-rata) Atas Hasil Survey Efektifitas Koordinasi pada Bidang Pemerintahan, Perekonomian dan Pembangunan, serta Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat melalui Jaksurvei							**2. Ketua Sub.Kelompok Kesehatan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk** **3. Ketua Sub.Kelompok Pendidikan, Kebudayaan dan Mental Spiritual** **4. Ketua Sub.Kelompok Perindustrian, Perdagangan dan UKM** **5. Ketua Sub.Kelompok Pariwisata, Pangan Kelautan, Perikanan dan Pertanian** **6. Ketua Sub.Kelompok Perhubungan**

No...

No	Sasaran	No	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan	Penanggung Jawab
						I	II	III	IV			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												dan Tenaga Kerja **7.** Ketua Sub.Kelompok Pelayanan Hukum **8.** Ketua Sub.Kelompok Bantuan Hukum **9.** Ketua Sub.Kelompok Publikasi Hukum dan HAM

No...

No	Sasaran	No	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan	Penanggung Jawab
						I	II	III	IV			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	Optimalisasi Upaya Penanggulangan Banjir (Sub.KSD.1)	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Penanggulangan Banjir dan ROB Sub KSD Optimalisasi Upaya Penanggulangan Banjir	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Penanggulangan Banjir dan ROB Sub KSD Optimalisasi Upaya Penanggulangan Banjir. Terbitnya SK Walikota u/ Penetapan Loksem di Waduk Sunter Selatan **Target Capaian:** Penetapan Lokasi Sementara	N/A	100	N/A	N/A	100	Persen	**Eselon III:** 1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan 2. Camat Tanjung Ptiok 3. Kabag. Perekonomian **Eselon IV:** **1. Ketua Sub.Kelompok Perindustrian, Perdagangan dan KUKM** **2.** Lurah Sunter Jaya

No...

No	Sasaran	No	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan	Penanggung Jawab
						I	II	III	IV			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	Meningkatnya Stabilitas dan Ketahanan Kota (Sub.KSD 2)	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Penanggulangan Banjir dan ROB Sub KSD Penataan dan Pengelolaan Kawasan Pesisir Teluk Jakarta dan Kepulauan Seribu	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Penanggulangan Banjir dan ROB Sub KSD Penataan dan Pengelolaan Kawasan Pesisir Teluk Jakarta dan Kepulauan Seribu. Pendataan estimasi jumlah KK terdampak pembangunan tanggul NCICD Klaster Muara Angke Catatan: Nama dan alamat menggunakan data eksisting **Target Capaian:** Pendataan estimasi jumlah KK terdampak pembangunan tanggul NCICD Klaster Muara Angke disampaikan ke Biro PLH dan ditembuskan ke DPRKP dan DSDA (Maret)	100	N/A	N/A	N/A	100	Persen	**Eselon III:** 1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan 2. Camat Penjaringan 3. Kabag. Pembangunan dan LH **Eselon IV:** **1. Ketua Sub Kelompok Pekerjaan Umum** **2.** Lurah Pluit

No...

No	Sasaran	No	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan	Penanggung Jawab
						I	II	III	IV			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	Berkurangnya Ketimpangan Serta Terjaminnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Perlindungan Sosial (Sub.KSD 10)	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Penanggulangan Kemiskinan Sub KSD Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Penanggulangan Kemiskinan Sub KSD Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Tercapainya target sub kegiatan dan rencana aksi penunjang tahun 2024 oleh Perangkat Daerah yang tercantum di dalam dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Tahun 2023-2026 berbasis Data yang Akurat **Target Capaian:** Laporan progres pelaksanaan dan pencapaian target sub kegiatan serta rencana aksi penunjang tahun 2024 oleh Perangkat Daerah yang tercantum di dalam dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Tahun 2023-2026 berbasis Data yang Akurat	100	100	100	100	100	Persen	**Eselon III:** 1. Asisten Administrasi dan Kesra 2. Kabag. Kesejahteraan Rakyat **Eselon IV:** **1. Ketua Sub.Kelompok Sosial, Olahraga, Perpustakaan dan Kearsipan** 2. Ketua Sub.Kelompok Pendidikan, Kebudayaan dan Mental Spiritual 3. Ketua Sub.Kelompok Kesehatan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk

No...

No	Sasaran	No	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan	Penanggung Jawab
						I	II	III	IV			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	Tercapainya Perbaikan Pola Aktivitas dan Mobilitas Melalui Pengembangan Kota Berorientasi Transit (Sub.KSD 19)	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan dasar perkotaan Sub KSD Penyediaan Jalan dan Infrastuktur Pelengkapnya	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan dasar perkotaan Sub KSD Penyediaan Jalan dan Infrastuktur Pelengkapnya Telaksananya kegiatan sosialisasi pembangunan dan terbitnya hasil inventarisasi dan penagihan SIPPT/IPPR/IPPT di sekitar lokasi pembangunan trotoar **Target Capaian:** 1. Terbitnya hasil inventarisasi dan penagihan SIPPT/IPPR/IPPT di sekitar lokasi pembangunan trotoar (Mei 2024) 2. Terfasilitasinya kegiatan sosialisasi pembangunan trotoar dan kelengkapannya (Juni 2024)	N/A	100	N/A	N/A	100	Persen	**Eselon III:** 1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan 2. Kabag. Pembangunan dan LH **Eselon IV:** **1. Ketua Sub.Kelompok Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan**
7	Meningkatnya Kualitas, Aksesibilitas,	1	Persentase penyelesaian rencana aksi	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi	N/A	100	N/A	100	100	Persen	**Eselon III:** 1. Asisten Pemerintahan

No...

No	Sasaran	No	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan	Penanggung Jawab
						I	II	III	IV			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	dan Kemudahan Layanan Masyarakat (Sub.KSD 20)		KSD Peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan dasar perkotaan Sub KSD Penataan kawasan yang dikoordinasikan oleh Walikota/Bupati		Peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan dasar perkotaan Sub KSD Penataan kawasan yang dikoordinasikan oleh Walikota/Bupati Penataan RW Kumuh sebagai Pilot Project di Kelurahan Pegangsaan Dua RW 03 **Target Capaian:** Laporan Monitoring dan Evaluasi Penataan RW Kumuh sebagai Pilot Project di Jakarta Utara							2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan 3. Camat Kelapa Gading 4. Kabag. Pembangunan dan LH 5. Kabag. Pemerintahan **Eselon IV:** **1. Ketua Sub.Kelompok Pekerjaan Umum** **2.** Lurah Pegangsaan Dua
		2		e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan dasar perkotaan Sub KSD Penataan kawasan yang	100	100	100	100	100	Persen	**Eselon III:** 1. Asisten Pemerintahan 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan

No...

No	Sasaran	No	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan	Penanggung Jawab
						I	II	III	IV			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					dikoordinasikan oleh Walikota/Bupati Tertatanya 124 Kawasan Tingkat Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Utara **Target Capaian:** Terimplementasikannya Penataan Kawasan Tingkat Kelurahan di 31 Lokasi							3. Kabag. Pembangunan dan LH 4. Kabag. Pemerintahan **Eselon IV:** **1. Ketua Sub.Kelompok Pekerjaan Umum** **2.** Ketua Sub.Kelompok Tata Praja
		3		e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan dasar perkotaan Sub KSD Penataan kawasan yang dikoordinasikan oleh Walikota/Bupati Penataan Kawasan GOR Bahtera Jaya dan Kawasan Ruang Bawah Jalan Tol Layang Catatan: Laporan B06: berfokus pada masukan tambahan yang dapat	N/A	100	N/A	100	100	Persen	**Eselon III:** 1. Asisten Pemerintahan 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan 3. Kabag. Pembangunan dan LH 4. Kabag. Pemerintahan **Eselon IV:** **1.Ketua Sub.Kelompok**

No...

No	Sasaran	No	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan	Penanggung Jawab
						I	II	III	IV			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					diusulkan dalam APBD Perubahan Laporan B12: berfokus pada pelaporan akhir **Target Capaian:** Laporan Monitoring dan Evaluasi Penataan Kawasan di Jakarta Utara							**Pekerjaan Umum**
8	Terakselerasinya Transformasi Digital dan Pengembangan Ekosistem Kota Cerdas (Sub. KSD 23)	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Transformasi Digital	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Transformasi Digital Tersusunnya rancangan final Dokumen Manajemen Risiko SPBE Perangkat Daerah **Target Capaian:** Rancangan Dokumen Manajemen Risiko SPBE Perangkat Daerah	N/A	N/A	N/A	100	100	Persen	**Eselon III:** 1. Asisten Administrasi dan Kesra 2. Kabag. Program, Pelaporan dan Keuangan **Eselon IV:** **1.Ketua Sub.Kelompok Program dan Pelaporan**
9	Tercapainya Perbaikan Manajemen dan Arsitektur Kinerja	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Perwujudan	100	100	100	N/A	100	Persen	**Eselon III:** 1. Asisten Pemerintahan 2. Asisten Administrasi dan Kesra

No...

No	Sasaran	No	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan	Penanggung Jawab
						I	II	III	IV			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Pemerintah (Sub.KSD 24)		yang Profesional Sub KSD Perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)		Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah (Eselon 2, 3, 4, Fungsional dan Pelaksana) Tahun 2024 dan 2025 **Target Capaian:** 1. Dokumen Rancangan Final Perjanjian Kinerja (Eselon 2) B.03 2. Rekap Matriks Peran dan Hasil Perangkat Daerah (Eselon 2, 3, 4 dan Jabatan Fungsional dan Pelaksana) Tahun 2024 (B.06) 3. Laporan pegawai yang telah menyusun SKP Tahun 2024 (B.06) 4. Matriks Rancangan Cascading Kinerja Perangkat Daerah (Eselon 2, 3 dan 4) Tahun 2025 (selesai dan disampaikan kepada Biro							3. Kabag. KKPP 4. Kabag. Program, Pelaporan dan Keuangan **Eselon IV:** **1. Ketua Sub.Kelompok Kepegawaian** **2. Ketua Sub.Kelompok Ketatalaksanaan** **3. Ketua Sub.Kelompok Program dan Pelaporan**

No...

No	Sasaran	No	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan	Penanggung Jawab
						I	II	III	IV			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Koordinasi pada 31 Juli 2024)) B.09							
		2		e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Tersusunnya Dokumen Evaluasi Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah **Target Capaian:** **B.03** Dokumen Evaluasi Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah TW IV Tahun 2023 **B.06** 1. Dokumen Evaluasi Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah TW I Tahun 2024 2. Dokumen evaluasi Perjanjian Kinerja Perangkat	100	100	100	100	100	Persen	**Eselon III:** 1. Asisten Pemerintahan 2. Asisten Administrasi dan Kesra 3. Kabag. KKPP 4. Kabag. Program, Pelaporan dan Keuangan **Eselon IV:** **1. Ketua Sub.Kelompok Ketatalaksanaan** **2. Ketua Sub.Kelompok Program dan Pelaporan**

No...

No	Sasaran	No	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan	Penanggung Jawab
						I	II	III	IV			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Daerah Semester I Tahun 2024 **B.09** Dokumen Evaluasi Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah TW II Tahun 2024 **B.12** 1. Dokumen Evaluasi Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah TW III Tahun 2024 2. Dokumen evaluasi Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Semester II Tahun 2024							
		3		e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).	100	N/A	N/A	N/A	100	Persen	**Eselon III:** 1. Asisten Pemerintahan 2. Kabag. KKPP **Eselon IV:** **1. Ketua Sub. Kelompok**

No...

No	Sasaran	No	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan	Penanggung Jawab
						I	II	III	IV			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Tersusunnya laporan kinerja Perangkat Daerah yang berkualitas dan tepat waktu **Target Capaian:** 1. Dokumen LKIP Perangkat Daerah Tahun 2023 2. Screenshot LKIP telah terupload pada website esr.menpan.go.id							**Ketatalaksanaan**
		4		e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Tersusunnnya laporan hasil monitoring penyelesaian rekomendasi hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah **Target Capaian:** Laporan hasil monitoring penyelesaian rekomendasi hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2023	N/A	N/A	100	N/A	100	Persen	**Eselon III:** 1. Asisten Administrasi dan Kesra 2. Kabag. Program, Pelaporan dan Keuangan **Eselon IV:** **1. Ketua Sub.Kelompok Program dan Pelaporan**

No...

No	Sasaran	No	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan	Penanggung Jawab
						I	II	III	IV			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	Berkembangnya Kapasitas, Profesionalitas, dan Iklim Kerja Aparatur (KSD 25)	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Peningkatan Profesionalitas SDM Pemprov DKI Jakarta	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Peningkatan Profesionalitas SDM Pemprov DKI Jakarta. Tersusunnya Analisis Jenis Pekerjaan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jenis Pekerjaan Tenaga Non ASN Tahun 2025. **Target Capaian:** **Laporan Analisis Jenis Pekerjaan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jenis Pekerjaan Tenaga Non ASN PJLP Tahun 2025 sesuai Kepgub 1195 Tahun 2022**	100	N/A	N/A	N/A	100	Persen	**Eselon III:** 1. Asisten Pemerintahan 2. Kabag. KKPP **Eselon IV:** **1. Ketua Sub.Kelompok Kepegawaian**
		2		e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Peningkatan Profesionalitas SDM Pemprov DKI Jakarta.	N/A	100	N/A	100	100	Persen	**Eselon III:** 1. Asisten Administrasi dan Kesra 2. Kabag. Program, Pelaporan dan Keuangan **Eselon IV:**

No...

No	Sasaran	No	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan	Penanggung Jawab
						I	II	III	IV			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Ditindaklanjutinya rekomendasi Hasil Pengawasan APIP atas LHP yang terbit periode tahun 2019 s.d. 2024. **Target Capaian:** 1. TLHP APIP selesai ditindaklanjuti atas LHP yang terbit periode tahun 2019 s.d. 2024. Target capaian 90% (B.06) 2. TLHP APIP selesai ditindaklanjuti atas LHP yang terbit periode tahun 2019 s.d. 2024. Target capaian 95% (B.12)							**1. Kasubag. Tata Usaha Keuangan**
Sasaran Khusus												
11	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan	1	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program prioritas dan strategis	e-Kinerja	**Definisi :** a. Persentase tersusunnya strategi komunikasi program prioritas dan strategis Daerah. b. Persentase terpublikasikannya materi komunikasi melalui media	100	100	100	100	100	Persen	**Eselon III:** 1. Asisten Administrasi dan Kesra 2. Kabag. Umum dan Protokol **Eselon IV:**

No...

No	Sasaran	No	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan	Penanggung Jawab
						I	II	III	IV			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	strategis Daerah		serta respons perangkat daerah dengan program prioritas dan strategis pada saat krisis komunikasi program.		internal Perangkat Daerah terpilih atau media massa atau media sosial atau aktivitas komunikasi lainnya. c. Persentase respons terhadap krisis komunikasi. d. Persentase respons interaktif terhadap pertanyaan/komentar warganet yang relevan. **Metode Pengukuran :** a. Bobot 35%: PD dengan program prioritas dan strategis menyusun strategi komunikasi program prioritas dan strategis Daerah. b. Bobot 30%: PD dengan program prioritas dan strategis mempublikasikan materi komunikasi melalui media internal Perangkat Daerah atau media massa							**1. Kasubag. Tata Usaha**

No...

No	Sasaran	No	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan	Penanggung Jawab
						I	II	III	IV			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					atau media sosial atau aktivitas komunikasi lainnya. c. Bobot 20%: PD dengan program prioritas dan strategis memberikan respons terhadap krisis komunikasi. d. Bobot 15%: PD dengan program prioritas dan strategis memberikan respons interaktif terhadap pertanyaan/komentar warganet yang relevan.							
12	Terwujudkannya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah yang berkualitas	1	Nilai kualitas data SDI	e-Kinerja	**Dasar Hukum :** a. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi b. Keputusan Gubernur Nomor 61 Tahun 2024 Tentang Daftar Data Tahun 2024 **Definisi :** Nilai Kualitas Data SDI terdiri atas 4 aspek yaitu: a. Aspek Ketepatan Waktu : Mengukur kepatuhan waktu	N/A	N/A	N/A	3,25	3,25	Nilai	**Eselon III:** 1. Asisten Administrasi dan Kesra 2. Asisten Pemerintahan 3. Kabag. Umum dan Protokol 4. Kabag. Pemerintahan **Eselon IV:** **1. Kasubag. Tata Usaha**

No...

No	Sasaran	No	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan	Penanggung Jawab
						I	II	III	IV			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					pengumpulan data oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata sesuai dengan jadwal. b. Aspek Kelengkapan Data : Mengukur kelengkapan komponen data yang dikumpulkan oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata sesuai dengan jadwal. c. Aspek Keunikan Isi Data: Mengukur tingkat duplikasi data yang dikumpulkan oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata. d. Aspek Validitas Data : Mengukur validitas data oleh Produsen Data. **Formula Perhitungan :** Nilai Kualitas Data SDI = [(Nilai Aspek Ketepatan Waktu) + (Nilai Aspek Kelengkapan Data) + (Nilai Aspek Keunikan Isi Data) + (Nilai Aspek Validitas Data)]							**2.** Ketua Sub. Kelompok Bina Pemerintahan

No...

No	Sasaran	No	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan	Penanggung Jawab
						I	II	III	IV			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					(Rentang nilai kualitas data SDI: 0 - 4) **Keterangan :** a. Nilai Aspek Ketepatan Waktu = (Jumlah data terkumpul ke walidata / Jumlah data yang wajib terkumpul sesuai ketetapan) b. Nilai Aspek Kelengkapan Data = (Jumlah file data yang memiliki komponen lengkap /Jumlah file data sesuai ketetapan) c. Nilai Aspek Keunikan Isi Data = (Jumlah file data yang tidak memiliki duplikasi pada variabel kunci / Jumlah file data sesuai ketetapan) d. Nilai Aspek Validitas Data = (Jumlah file data yang tervalidasi oleh produsen data / Jumlah file data sesuai ketetapan) **Catatan :** 1. Batas waktu pengumpulan data adalah tanggal 5 bulan berikutnya dari jadwal rilis							

No...

No	Sasaran	No	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan	Penanggung Jawab
						I	II	III	IV			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					2. Batas akhir perbaikan data adalah tanggal 20 bulan berikutnya dari jadwal rilis Sumber Data: Porial Data Provinsi DKI Jakarta							
13	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	1	Survei Kepuasan Layanan Masyarakat	e-Kinerja	**Dasar Hukum:** 1. Peraturan Menteri PAN&RB No. 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. 2. Seruan Gubernur No. 7 Tahun 2019 tentang Dukungan Dalam Rangka Survei atas Kinerja Walikota/Bupati, Camat, dan Lurah **Definisi:** Survei atas kinerja Walikota/Bupati yang dilakukan terhadap responden sebagaimana termuat dalam Seruan Gubernur No. 7 Tahun	92	N/A	92	N/A	92	Nilai	**Eselon III:** 1. Asisten Pemerintahan 2. Kabag. Pemerintahan **Eselon IV:** **1. Ketua Sub.Kelompok Bina Pemerintahan**

No...

No	Sasaran	No	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan	Penanggung Jawab
						I	II	III	IV			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					2019 pada wilayah masing-masing. **Metode Pengukuran:** Nilai diperoleh dari hasil Survei Kepuasan Layanan Masyarakat melalui sistem Jaksurvei							
14	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	1	Persentase Pelaksanaan Inventarisasi BMD pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	e-Kinerja	**Definisi:** Capaian Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah berupa Peralatan dan Mesin pada Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang. Inventarisasi BMD berupa Peralatan dan Mesin dilaksanakan oleh PD/UKPD dan UPB **Penghitungan melalui sistem e-Inventarisasi:** a. Bobot 5% PD/UKPD/UPB menyusun SK Tim, membuat Daftar Ruangan dan Daftar BMD b. Bobot 85% PD/UKPD/UPB menyelesaikan penginputan data informasi dalam kertas kerja sesuai	5	25	55	100	100	Persentase	**Eselon III:** 1. Asisten Administrasi dan Kesra 2. Para Camat 3. Kabag. Umum dan Protokol **Eselon IV:** **1. Kasubag. Rumah Tangga** **2.** Para Lurah

No...

No	Sasaran	No	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan	Penanggung Jawab
						I	II	III	IV			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					dengan jumlah BMD yang dimiliki c. Bobot 10% PD/UKPD/UPB menyusun Berita Acara, SPTJM dan Laporan Hasil Inventarisasi (LHI)							

No	Sasaran	No	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan	Penanggung Jawab
						I	II	III	IV			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	Peningkatan penggunaan produk dalam negeri	1	Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri	e-Kinerja	**Dasar Hukum :** a. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian; b. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri; c. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan d. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	N/A	30	N/A	80	80	Persentase	**Eselon III:** 1. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat 2. Para Camat 3. Kabag. Program, Pelaporan dan Keuangan 4. Kabag. Umum dan Protokol **Eselon IV:** **1. Kasubbag. Tata Usaha Keuangan** **2. Kasubbag Rumah Tangga** **3.** Para Lurah

No...

No	Sasaran	No	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan	Penanggung Jawab
						I	II	III	IV			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Definisi : a. Produk Dalam Negeri adalah barang dan jasa termasuk rancang bangun dan perekayasaan yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan berproduksi di Indonesia ditunjukkan dengan pernyataan penyedia telah menggunakan produk dalam negeri (self declare) b. Sertifikat TKDN adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian yang menjelaskan kandungan dalam negeri pada barang, jasa dan gabungan barang dan jasa. c. Belanja Pengadaan adalah belanja barang/jasa, belanja hibah barang, belanja bantuan sosial barang, dan belanja modal (melalui Penyedia dan Swakelola) dengan kode rekening: 5.1.02 - Belanja Barang dan Jasa							

No	Sasaran	No	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan	Penanggung Jawab
						I	II	III	IV			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					5.1.05.01.02.0001 - Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat 5.1.06.03.02.0001 - Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat 5.2.02 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.03 - Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.04 - Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.2.05 - Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 5.2.06 - Belanja Modal Lainnya **Metode Pengukuran :** Jumlah realisasi Belanja Pengadaan bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri dibandingkan dengan realisasi (SPJ) Belanja Pengadaan.							

No	Sasaran	No	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan	Penanggung Jawab
						I	II	III	IV			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Sumber Data : a. Bigbox LKPP Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) P3DN Kementerian Dalam Negeri atau Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) DKI Jakarta – BPKD							

No	Sasaran	No	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan	Penanggung Jawab
						I	II	III	IV			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	Terimplementasinya Pengembangan Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran per tahun	1	Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran per tahun	e-Kinerja	**DASAR HUKUM :** a. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 203 Ayat (4) Pengembangan kompetensi bagi setiap PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun. b. Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Pegawai minimal sebanyak 40 (empat puluh) Jam Pelajaran Per Tahun. **DEFINISI :** Terselesaikannya Pemenuhan Pengembangan Kompetensi sesuai Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Pegawai minimal sebanyak 40 (empat puluh) Jam Pelajaran Per Tahun untuk seluruh PNS	N/A	N/A	N/A	100	100	Persentase	**Eselon III:** 1. Asisten Pemerintahan 2. Kabag. KKPP **Eselon IV:** **1.Ketua Sub.Kelompok Kepegawaian**

No	Sasaran	No	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan	Penanggung Jawab
						I	II	III	IV			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terdokumentasi dalam https://simdiklat-bpsdm.jakarta.go.id Realisasi Target berupa Laporan capaian pemenuhan jumlah jam pelajaran selama tahun 2024. **Metode Pengukuran :** [(Jumlah capaian pemenuhan jam pelajaran tahun 2024 / 40 (empat puluh) Jam Pelajaran X 100%)] **Sumber Data :** Simdiklat BPSDM dan PIntAr BPSDM							
17	Meningkatnya Manajemen Pengetahuan	1	Persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan	e-Kinerja	**Dasar Hukum :** Peraturan Gubernur Nomor 164 Tahun 2017 tentang Manajemen Pengetahuan. **Definisi :** Terselesaikannya penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan untuk seluruh SKPD Pemerintah Provinsi DKI	N/A	N/A	50	50	100	Persentase	**Eselon III:** 1. Asisten Pemerintahan 2. Kabag. KKPP **Eselon IV:** **1. Ketua Sub.Kelompok Kepegawaian**

No	Sasaran	No	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan	Penanggung Jawab
						I	II	III	IV			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Jakarta melalui https://km-bpsdm.jakarta.go.id **Metode Pengukuran :** Realisasi Target berupa 4 laporan baik berbentuk video maupun tulisan (wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada Minggu pertama tanggal 5 Bulan September Triwulan 3 dan Minggu pertama tanggal 5 Bulan November Triwulan 4). **Sumber Data :** https://km-bpsdm.jakarta.go.id							
18	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	1	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	e-Kinerja	**Dasar Hukum :** a. Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta b. Keputusan Gubernur Nomor 153 Tahun 2021 tentang Struktur Manajemen Risiko di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta **Definisi :**	N/A	50	N/A	100	100	Persentase	**Eselon III:** 1. Asisten Administrasi dan Kesra 2. Kabag. Program, Pelaporan dan Keuangan **Eselon IV:** **1. Ketua Sub.Kelompok Program dan Pelaporan**

No	Sasaran	No	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan	Penanggung Jawab
						I	II	III	IV			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Proses Manajemen Risiko dilakukan terhadap sasaran strategis yang terdapat dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dilakukan melalui 5 (lima) tahapan: a. Komunikasi dan konsultasi; b. Penetapan konteks; c. Penilaian Risiko (Identifikasi Risiko, Analisis Risiko dan Evaluasi Risiko); d. Penanganan Risiko; dan e. Pemantauan. Pemantauan dilakukan untuk memantau pelaksanaan rencana aksi penanganan Risiko, dan tren perubahan besaran/Level Risiko Laporan pemantauan dituangkan pada format Formulir Laporan Pemantauan Risiko. **Formula Pengukuran :** [(Jumlah dokumen yang terverifikasi oleh Inspektorat) / (Seluruh dokumen yang wajib							

No	Sasaran	No	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan	Penanggung Jawab
						I	II	III	IV			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada riwulan 4)] x 100% **Output Sasaran :** Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko TW II Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko TW IV **Metode Pengukuran :** Tersajinya dokumen-dokumen Implementasi Penerapan Manajemen Risiko yang telah diverifikasi oleh Inspektorat : **Triwulan II :** Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko TW II **Triwulan IV :** Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko TW IV							

No	Sasaran	No	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan	Penanggung Jawab
						I	II	III	IV			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	1	Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	e-Kinerja	**Dasar Hukum :** Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 195 : "Pemerintah Provinsi DKI Jakarta wajib menyediakan informasi Keuangan Daerah dan diumumkan kepada masyarakat diantaranya digunakan untuk membantu Gubernur dalam melakukan evaluasi Kinerja Keuangan Daerah." **Definisi Operasional :** Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi. 1. Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran. 2. Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai	N/A	N/A	N/A	71	71	Persentase	**Eselon III:** 1. Asisten Administrasi dan Kesra 2. Kabag. Program, Pelaporan dan Keuangan **Eselon IV:** **1. Kasubag. Perbendaharaan**

No	Sasaran	No	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan	Penanggung Jawab
						I	II	III	IV			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan/Subkegiatan dan pencapaian keluarannya yang diukur dalam 1 (satu) Tahun Anggaran. Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi dilakukan dengan mengukur variabel sebagai berikut : 1. Pengukuran Capaian Keluaran kegiatan/subkegiatan: - diukur dengan membandingkan antara realisasi indikator Keluaran (Output) Kegiatan dengan target indikator Keluaran (Output) Kegiatan. Sumber Data : e- SAKIP 2. Penyerapan Anggaran: - diukur dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan pagu anggaran.							

No	Sasaran	No	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan	Penanggung Jawab
						I	II	III	IV			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Sumber Data : Proyeksi APBD/ proyeksiapbd.jakarta.go.id 3. Efisiensi keluaran kegiatan/ sub.kegiatan: - dilakukan dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dengan pengeluaran sebenarnya. - Pengeluaran seharusnya merupakan jumlah anggaran yang direncanakan untuk menghasilkan capaian Keluaran (Output) Program atau capaian Keluaran (Output) Kegiatan. - Pengeluaran sebenarnya merupakan jumlah anggaran yang terealisasi untuk menghasilkan capaian Keluaran (Output) Program atau capaian Keluaran (Output) Kegiatan. Sumber Data :							

No	Sasaran	No	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan	Penanggung Jawab
						I	II	III	IV			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					a. data capaian Keluaran (Output) Kegiatan/Subkegiatan sumber data e-sakip; b. pagu anggaran data sumber data proyeksi APBD; dan c. realisasi anggaran sumber data proyeksi APBD. 4. Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan: - dilakukan dengan memperhitungkan deviasi antara realisasi anggaran dengan rencana penarikan dana setiap bulan. Sumber Data : proyeksi APBD Bobot masing-masing variabel Aspek Implementasi sebagai berikut: Bp = 9,7% BK = 18,2% Bckk = 43,5% BE = 28,6%							

No	Sasaran	No	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan	Penanggung Jawab
						I	II	III	IV			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					BP : Bobot penyerapan anggaran BK : Bobot konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan BCK : Bobot capaian keluaran BE : Bobot efisiensi Pembobotan Nilai Kinerja atas Aspek Implementasi yang dihasilkan : ≤ 60 = Rendah > 60 s.d 70 = cukup > 70 s.d 90 = Baik > 90 s.d 100 = Sangat Baik							
Sasaran Operasional												
20	Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	1	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	e-Kinerja	Jumlah Realisasi TL Arahan Gubernur (rapim, e-office, arahan melalui media elektronik, dan bentuk arahan lainnya) dibagi Jumlah TL Arahan Gubernur dikali 100%	100	100	100	100	100	Persentase	**Eselon III:** 1. Asisten Pemerintahan 2. Kabag. KKPP **Eselon IV:** **1. Ketua Sub.Kelompok Pelayanan Publik**

No	Sasaran	No	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan	Penanggung Jawab
						I	II	III	IV			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	1	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	CRM	Jumlah Realisasi TL Aduan Masyarakat dibagi Jumlah TL Aduan Masyarakat di kali 100%	100	100	100	100	100	Persentase	**Eselon III:** 1. Asisten Pemerintahan 2. Kabag. KKPP **Eselon IV:** **1. Ketua Sub.Kelompok Pelayanan Publik**
22	Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	1	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	e-Kinerja	(90% dari jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan UKPD dibawah koordinasinya / jumlah sisa rekomendasi yang belum ditindaklanjuti dari LHP BPK RI tahun 2005 dan seterusnya) x 100% (Verifikasi oleh Inspektorat)	25	25	25	25	100	Persentase	**Eselon III:** 1. Asisten Administrasi dan Kesra 2. Kabag. Program, Pelaporan dan Keuangan **Eselon IV:** **1. Kasubag. Tata Usaha Keuangan**

No	Sasaran	No	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan	Penanggung Jawab
						I	II	III	IV			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA,

ALI MAULANA HAKIM
NIP 197204261991011001

LAMPIRAN II
SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

NOMOR e-0047 Tahun 2024

TENTANG
PENANGGUNG JAWAB INDIKATOR KINERJA PERJANJIAN KINERJA WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
TAHUN 2024

INDIKATOR WAJIB RENCANA KINERJA PEGAWAI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA TAHUN 2024

No	Sasaran	No	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan	Penanggung Jawab
						I	II	III	IV			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Sasaran Khusus												
1	Meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa	1	Persentase Pemanfaatan E-Order	e-Kinerja	**Formula Pengukuran :** Jumlah Realisasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) rekening makan minum rapat, jamuan dan lapangan dibandingkan dengan transaksi di e-order **Sumber Data :** Data Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) BPKD Kode Rekening Makan Minum	100	100	100	100	100	Persentase	**Eselon III:** 1. Asisten Pemerintahan 2. Asisten Administrasi dan Kesra 3. Para Camat 4. Kabag. Pemerintahan

No	Sasaran	No	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan	Penanggung Jawab
						I	II	III	IV			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					(Dikecualikan untuk Galon, Kopi, Teh, Gula, dst.)							5. Kabag. Program, Pelaporan dan Keuangan 6. Kabag. Umum dan Protokol **Eselon IV:** **1. Kasubbag Perbendaharaan** **2. Kasubbag Protokol** **3. Kasubbag Administrasi Pemerintahan** 4. **Para Lurah**
2	Terimplementasinya Pengembangan Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran per tahun	1	Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran per tahun	e-Kinerja	**DASAR HUKUM :** a. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 203 Ayat (4) Pengembangan kompetensi bagi setiap PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam	N/A	N/A	N/A	100	100	Persentase	**Semua unsur:** **1. Para Pejabat Administrator Kota Adm. Jakarta Utara** **2. Para Pejabat Pengawas Kota Adm. Jakarta Utara**

No	Sasaran	No	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan	Penanggung Jawab
						I	II	III	IV			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					pelajaran dalam 1 (satu) tahun. b. Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Pegawai minimal sebanyak 40 (empat puluh) Jam Pelajaran Per Tahun. **DEFINISI :** Terselesaikannya Pemenuhan Pengembangan Kompetensi sesuai Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Pegawai minimal sebanyak 40 (empat puluh) Jam Pelajaran Per Tahun untuk seluruh PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terdokumentasi dalam https://simdiklat-bpsdm.jakarta.go.id							**3. Para Ketua Sub Kelompok Kota Adm. Jakarta Utara** **Para Pejabat Pelaksana Kota Adm. Jakarta Utara**

No	Sasaran	No	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan	Penanggung Jawab
						I	II	III	IV			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Realisasi Target berupa Laporan capaian pemenuhan jumlah jam pelajaran selama tahun 2024. **Metode Pengukuran :** [(Jumlah capaian pemenuhan jam pelajaran tahun 2024 / 40 (empat puluh) Jam Pelajaran X 100%)] **Sumber Data :** Simdiklat BPSDM dan PIntAr BPSDM							

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA,

ALI MAULANA HAKIM
NIP 197204261991011001